

KOMUNITAS ADAT TERPENCIL MENGGAPAI HARAPAN: STUDI PADA SUKU DAYAK DEAH SIALING KABUPATEN TABALONG

REMOTE INDIGENOUS COMMUNITIES REACH FOR HOPE: A STUDY ON DAYAK DEAH SIALING TRIBES, TABALONG DISTRICT

Chatarina Rusmiyati

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)
Kementerian Sosial RI Yogyakarta, Jl. Kesejahteraan Sosial No.1 Sonosewu Yogyakarta.
E-mail: chatarinarus65@gmail.com

Diterima: 10 Oktober 2019; Direvisi: 15 Juli 2020, Disetujui: 10 Agustus 2020

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Dayak Deah Sialing dalam menggapai harapan setelah diberdayakan. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif, untuk mengetahui dan menggambarkan kegiatan pemberdayaan KAT, serta manfaat yang diperoleh warga binaan KAT. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposif*, yakni Desa Sialing Kabupaten Tabalong sebagai salah satu lokasi purna bina pemberdayaan KAT. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan memanfaatkan dokumen yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perubahan secara positif kondisi KAT sebelum dan sesudah pemberdayaan. Semua warga KAT yang dimukimkan telah menempati rumah bantuan pemerintah. Terkait kepemilikan kartu identitas diri, setelah diberdayakan masih dijumpai warga yang belum memiliki sehingga menjadi perhatian khusus dari pemerintah desa setempat. Setelah dimukimkan ada pelayanan kesehatan oleh Puskesmas Keliling bagi warga. Di bidang pendidikan telah dibangun ruang kelas untuk belajar bagi anak usia balita (PAUD). Sarana prasarana seperti akses jalan menuju Sialing sudah tersedia, MCK ada meski jumlahnya masih terbatas. Sudah dibangun balai sosial untuk tempat berkumpul, beribadah dan kegiatan lain., sedang lampu penerangan belum tersedia. Warga Suku Dayak Deah Sialing dimukimkan dalam satu lokasi. mereka berasal dari Suku Dayak Deah, mereka mampu berinteraksi sosial dengan baik termasuk dengan masyarakat sekitar. Warga KAT berharap pemberdayaan dilanjutkan dengan penambahan fasilitas yang belum ada tetapi sangat dibutuhkan, seperti MCK, penerangan, penyuluhan dan bimbingan terkait budidaya pertanian dan perikanan, pembuatan sertifikat lahan serta kartu identitas diri bagi yang belum memiliki. Perlu peran dan keterlibatan pemerintah dalam mensinergikan program pemberdayaan serta mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam menyediakan akses pemenuhan kebutuhan dasar warga KAT.

Kata Kunci: *pemberdayaan sosial, komunitas adat terpencil, menggapai harapan.*

Abstract

The research aims to describe the condition of Dayak Deah Sialing tribes KAT residents in reaching hopes after being empowered. The research is qualitative descriptive and aims to find out and describe KAT empowerment activities, as well as the benefits obtained by KAT fostered residents. The research location was determined purposively, namely Sialing Village, Tabalong District as one of the locations after KAT empowerment development. Data collection was done by interviews, observations and utilizing existing documents. The results showed that there were positive changes in KAT conditions before and after empowerment. All KAT residents resettled occupied the government aid houses. Regarding ownership of identity cards, after being empowered, residents were still found who did not have them so that it was of particular concern from the local village government. After being resettled, there were health services provided by the mobile health center for residents. In the field of education, classrooms had been built for learning for children under five years old (PAUD). Infrastructure facilities such as access road to Sialing were available, MCK was available, although the number was still limited. A social center had been built

for gatherings, worship and other activities, while lighting was not yet available. Dayak Deah Sialing tribes resettled in one location. They came from the Dayak Deah tribes, they were able to interact socially well including to the surrounding community. KAT residents hope that empowerment will continue with the addition of facilities that do not yet exist but are very much needed, such as MCK, lighting, counseling and guidance related to agriculture and fisheries, making land ownership certificates and self-identity cards for those who have not had them yet. The role and involvement of the government is needed in synergizing the empowerment program and optimizing the role of the local government in providing access to fulfill the basic needs of KAT citizens.

Keywords: *social empowerment, remote indigenous communities, reaching hopes.*

PENDAHULUAN

Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial memberi amanat, bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial. Salah satu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan kesejahteraan sosial adalah Komunitas Adat Terpencil (KAT) (Republik Indonesia, 2009).

KAT sebagai bagian dari masyarakat Indonesia merupakan kelompok masyarakat yang secara geografis bertempat tinggal di daerah terpencil, terisolir, dan sulit dijangkau. Mereka merupakan kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan yang menjadi hak-haknya sebagai warga Negara (Jayaputra, A. & Shamadiyah, N., 2016). Sebagai warga negara, KAT memiliki hak untuk hidup sejahtera, memperoleh pelayanan sosial dasar, hak partisipasi dalam pembangunan dan hak perlindungan dari berbagai kondisi yang mengganggu baik secara sosial, budaya, ekonomi, hukum maupun politik (Republik Indonesia, 2013). Berbagai

hak yang dimiliki KAT perlu mendapatkan perhatian dan perlakuan dari pemerintah secara wajar, sebagaimana tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak warga negara pada umumnya.

KAT sebagai sekumpulan orang yang hidup terpencil, terisolir dan sulit dijangkau, rentan secara sosial ekonomi. KAT sebagai bagian dari warga Negara Indonesia, termasuk salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memerlukan perhatian khusus. Alasan mendasar KAT perlu diperhatikan secara khusus karena: 1) Secara kuantitas dan kualitas populasi KAT kurang tersentuh pembangunan; 2) Terkait harkat dan martabat manusia dan masalah HAM; 3) Belum menggambarkan pencapaian tujuan pembangunan nasional bagi bangsa; 4) Terkait masalah ketahanan nasional terutama KAT yang berdomisili di wilayah perbatasan antarnegara. Berdasar kondisi tersebut penanganan ataupun pemberdayaan menjadi penting untuk menyejahterakan KAT sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 186 Tahun 2014 adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan atau sosial budaya, miskin, terpencil, dan atau rentan sosial ekonomi (Republik Indonesia, 2014). KAT umumnya hidup terpencil, akses

sulit dijangkau, kurang tersentuh pembangunan sehingga rentan mengalami kemiskinan. Hal tersebut tergambar dari kondisi KAT, yakni a) Mengalami keterbatasan akses pelayanan sosial dasar, ditandai dengan belum tercukupi pelayanan di bidang pemenuhan kebutuhan dasar; b) Tertutup, ditandai dengan tingkat interaksi sosial dengan masyarakat yang lain masih terbatas; c) Homogen, ditandai adanya hidup dalam kesatuan suku yang relatif sama; d) Penghidupan bergantung kepada sumber daya alam; e) Marjinal di perdesaan dan perkotaan, masih mengalami keterbatasan akses untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan administrasi pemerintahan; f) Tinggal di wilayah perbatasan antarnegara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar, dan terpencil (Suradi, Mujiyadi, Unayah, N., Sitepu, H. & Suyanto, 2013).

Keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar, tertutup, homogen, miskin, dan terpencil, merupakan karakteristik utama yang melekat pada KAT di semua wilayah Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan KAT termasuk kelompok yang mengalami disfungsi sosial (*social disfunctioning*). Ciri khas kondisi yang menunjukkan disfungsi sosial, yaitu ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, memecahkan masalah yang dihadapi, dan ketidakmampuan melaksanakan berbagai tugas sesuai dengan peranan sosialnya (Suharto, 2010). KAT belum terjangkau dan terakses berbagai program pemerintah, mereka menjalani kehidupan dengan segala keterbatasan. Kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal yang layak belum dapat terpenuhi, fasilitas kesehatan belum dapat dinikmati, serta sebagian belum terakses pendidikan formal.

Pemberdayaan sosial terhadap KAT dimaksudkan untuk mengembangkan kemandirian mereka agar mampu memenuhi

kebutuhan dasar. Pemberdayaan KAT bertujuan untuk mewujudkan empat hal yaitu: a) perlindungan hak sebagai warga negara; b) pemenuhan kebutuhan dasar; c) integrasi KAT dengan sistem sosial yang lebih luas; dan d) kemandirian sebagai warga Negara (Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, 2016). Pemberdayaan KAT merupakan proses berkelanjutan dan berkesinambungan yang dilakukan dalam upaya mengubah kehidupan mereka. Perpres No 186 Tahun 2014 pasal 17 menegaskan, bahwa pemberdayaan KAT merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, dalam bidang permukiman, administrasi kependudukan, kehidupan beragama, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, penyediaan akses kesempatan kerja, penyediaan akses lahan, advokasi dan bantuan hukum, pelayanan sosial, lingkungan hidup dan bidang lain sesuai kebutuhan KAT (Republik Indonesia, 2014).

Pemberdayaan bukan bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri dan kemudian dilepas dalam kondisi kemandirian, meski perlu tetap diawasi dan dipantau agar kemandiriannya tidak kembali terpuruk. Artinya, pemberdayaan dilakukan melalui suatu proses belajar hingga mencapai status mandiri (Ife, J. & Tesoriero, F., 2008; Prijono, O.S. & Pranarka, A.M.W., 1996). Dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran dan tetap berdaya (Sulistiyani, A.T., 2004; Sumodiningrat, G., 2000).

Penelitian terkait pemberdayaan KAT telah banyak dilakukan. Hasil penelitian Sujarwani, R., Wulandari, F.D., Husni, A., Rianto, F., & Sarinah, (2018) di lokasi KAT Kabupaten Lingga Kepulauan Riau menunjukkan bahwa masih dijumpai kendala dalam proses

pemberdayaan. Pemerintah sebagai instansi lokal hanya memberikan pembinaan, pelatihan, dan pemahaman terhadap pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, sementara sarana prasarana belum dapat dilengkapi dengan baik seperti untuk pendidikan, tempat ibadah dan layanan kesehatan. Penelitian Bakar, A. & Ghofur, Abd., (2017) menemukan bahwa program pemberdayaan bagi Suku Sakai di Kabupaten Bengkalis telah dilakukan oleh pihak pemerintah dan swasta melalui pemberian beasiswa, bantuan peternakan, pertanian dan perkebunan, program Alokasi Dana Desa dan program UED-SP. Terkait program bantuan, ada yang bersifat produktif dan non produktif. Bantuan sifatnya non-produktif meliputi bantuan langsung dalam bentuk beasiswa; bantuan rumah RLH; bantuan uang untuk karang taruna; posyandu; PKK; surau dan masjid tidak banyak mengalami kendala. Kendala dalam program pemberdayaan yang sifatnya produktif karena kurangnya pendampingan dan pelatihan secara berkelanjutan.

Warga Suku Dayak Deah Desa Sialing awalnya hidup terpencar di dalam hutan, lokasinya terpisah dan jauh dari warga masyarakat lain. Kondisi ini mengakibatkan mereka kurang dapat berinteraksi dengan masyarakat lain dan kurang tersentuh berbagai program pembangunan. Warga Suku Dayak Deah Sialing sebagian bagian dari warga Negara Indonesia tentunya memiliki harapan agar mereka dapat memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar dan berhak dapat meningkatkan kesejahteraannya. Upaya tersebut dilakukan melalui program pemberdayaan KAT bagi warga Suku Dayak Deah di Desa Sialing. Berdasar latar belakang masalah tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimanakah kondisi warga KAT Suku Dayak Deah Desa Sialing setelah diberdayakan? Tujuan penelitian adalah untuk

mendeskripsikan kondisi warga KAT Suku Dayak Deah Sialing dalam menggapai harapan setelah diberdayakan. Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah memberi gambaran sekaligus masukan terkait pelaksanaan program pemberdayaan KAT.

METODE

Kajian ini bersifat deskriptif kualitatif, ingin mengetahui dan menggambarkan kegiatan pemberdayaan KAT, serta manfaat yang diperoleh warga KAT. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposif*, yakni Desa Sialing Kabupaten Tabalong sebagai salah satu lokasi yang pernah mendapatkan program pemberdayaan KAT dari Kementerian Sosial RI. Sumber data dalam kajian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan, yang terdiri dari warga KAT, pendamping KAT, aparat desa dan beberapa aparat instansi yang terlibat dalam pemberdayaan seperti dinas sosial, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas lingkungan hidup, dan dinas pertanian. Data sekunder diperoleh dari catatan, dokumen yang relevan dengan kebutuhan penelitian, yang diharapkan dapat melengkapi dan menunjang data primer.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara menggunakan panduan wawancara tidak berstruktur atau terbuka (Moleong, 2014). Wawancara dilakukan kepada warga KAT Desa Sialing yang telah diberdayakan melalui program pemberdayaan KAT oleh Kementerian Sosial berjumlah 45 orang, pendamping KAT, aparat desa dan instansi terkait lain. Selain wawancara juga dilakukan pengamatan (observasi) di lokasi pemberdayaan KAT. Menurut Wignyo, A., (2009), kombinasi hasil wawancara mendalam dan pengamatan langsung dalam penelitian kualitatif dapat menghasilkan data yang komprehensif. Studi dokumentasi diperoleh dari dokumen, buku,

jurnal, surat kabar, dan sumber lain sesuai kebutuhan penelitian.

Data dan informasi yang dijamin adalah data kualitatif, sehingga data yang sudah dikumpulkan dikelompokkan menurut substansi permasalahan. Langkah berikutnya, data yang terkumpul diinterpretasikan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu untuk menjelaskan data sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya, dan menganalisis hasil interpretasi data berdasarkan argumentasi yang bersifat faktual dan ilmiah. Analisis data mengacu pada model Miles, M.B. & Huberman, A.M., (2005) meliputi reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Kabupaten Tabalong

Tabalong adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ibukota Tanjung. Kabupaten Tabalong memiliki luas wilayah 3.575,53 km² dan berpenduduk sebanyak 239.593 jiwa, 50,78 persen atau 117.932 jiwa penduduk laki-laki dan 49,22 persen atau 121.661 jiwa perempuan (Tim BPS, 2016). Secara geografis, Kabupaten Tabalong berada di bagian utara Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki kawasan dataran rendah di bagian selatan, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh pegunungan Meratus di utara. Secara administrasi, Kabupaten Tabalong sebelah utara dan timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur, wilayah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Balangan, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah.

Motto atau semboyan Kabupaten Tabalong ialah *Saraba Kawa* yang dalam bahasa Banjar berarti Serba Sanggup. Semboyan *Saraba Kawa* mengandung arti bahwa masyarakat

sanggup bekerja membangun demi kemajuan Tabalong. Kabupaten Tabalong terbagi menjadi 12 kecamatan, yaitu Banua Lawas, Pugaan, Kelua, Muara Harus, Tanta, Tanjung, Murung Pudak, Haruai, Bintang Ara, Upau, Muara Uya, dan Jaro. Kecamatan Haruai merupakan salah satu kecamatan di Tabalong, terdiri dari 13 desa dengan ibukota kecamatan berada di Desa Halong. Secara Administratif Kecamatan Haruai berbatasan dengan Kecamatan Muara Uya di sebelah utara, Kecamatan Murung Pudak dan Tanjung di sebelah selatan, Kecamatan Upau di sebelah timur, dan dengan Kecamatan Bintang Ara di sebelah barat.

Desa Nawin merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Haruai. Menurut hasil wawancara dengan Mahrani selaku Kepala Desa Nawin, desa tersebut merupakan hasil penyatuan dari tiga desa yaitu Desa Nawin Hulu, Desa Batu Pulut Hulu, dan Desa Batu Pulut Hilir. Desa Nawin terbagi dalam 10 rukun warga (RW), dengan jumlah penduduk keseluruhan 2.051 jiwa, 1.027 laki-laki dan 1.024 perempuan. Dusun Sialing menjadi bagian dari RW 2 memiliki kesamaan etnis yakni Suku Dayak Deah. Posisi lokasi Sialing saat ini terpisah jauh dari pusat Desa Nawin, untuk mencapai lokasi Sialing harus melewati Desa Hayup, Desa Halong, dan Desa Pasar Batu sejauh kurang lebih 14,3 kilometer.

Wilayah Sialing merupakan permukiman tertua di Desa Nawin. Sejak zaman penjajahan kolonial Belanda, Suku Dayak Deah telah bermukim di Sialing, dan ketika itu wilayah tersebut menjadi tempat persembunyian para pejuang kemerdekaan. Setelah merdeka, khususnya pada masa orde lama, Suku Dayak Deah di Sialing sering menjadi sasaran gerombolan pengacau yang memaksa mereka menyerahkan hasil berladang padi. Hal itu didukung pernyataan salah satu tokoh adat setempat (R, sekitar 70 tahun) yang menyatakan:

“Saya pernah mengalami, pada waktu itu saya masih kecil, tiba-tiba datang segerombolan orang meminta secara paksa hasil panen orangtua kami, padi yang disimpan, diambil begitu saja”.

Kondisi yang tidak aman tersebut mendorong sebagian penduduk Sialing melakukan migrasi keluar, terutama pindah ke wilayah yang sekarang menjadi pusat Desa Nawin. Informasi lebih lanjut diketahui, bahwa wilayah Sialing dijadikan warga Suku Dayak Deah untuk berkebun karet dan berladang. Pohon karet dahulu ditanam oleh orang tua, kakek nenek mereka, dikelola dan menjadi milik secara turun temurun. Kualitas pohon karet tersebut kurang bagus sehingga *lateks* yang dihasil juga kurang berkualitas.

Dalam pengamatan terlihat ada potensi wisata Gunung Sialing dan Gunung Manjuyu berupa bebatuan kapur sebagai bahan baku semen dan juga terdapat Goa Kelelawar, Goa Tabala, Goa Landak, dan Goa Besar dengan kedalaman lebih dari 100 meter. Suku Dayak Deah mempercayai kedua gunung tersebut sebagai warisan leluhur yang penuh misteri gaib sehingga harus dijaga kelestariannya.

Dusun Sialing berada di daerah pegunungan batu dengan panorama alam yang indah serta memiliki objek wisata goa. Dusun Sialing berada di kawasan Gunung Sialing dihuni warga Suku Dayak Deah yang hidup terpisah, terpencar dan berpindah-pindah. Suku ini mengandalkan hidup dari berladang yang dilakukan secara berpindah-pindah. Mereka membuat gubug sederhana dan tidak permanen untuk tempat tinggal. Gubug yang mereka buat tidak bisa tahan lama dan biasanya akan ditinggalkan ketika mereka harus berpindah ke ladang yang baru. Akses menuju Dusun Sialing berupa jalan setapak yang hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Menurut informasi

Kepala Desa Nawin, sebelum diberdayakan sekitar empat tahun yang lalu, Dusun Sialing suasananya masih sangat magis, ketika bertandang ke dusun tersebut bulu kuduk terasa merinding, serasa ada sesuatu yang mengamati dan mengikuti pengunjung. Kondisi tersebut membuat dusun tersebut semakin terpencil, karena jarang dikunjungi dan kurang tersentuh berbagai program pembangunan.

KAT yang diberdayakan di Sialing termasuk kategori hidup menetap sementara. Hidup menetap sementara ditandai oleh tempat tinggal yang tetap walaupun sering ditinggal karena mengikuti mata pencaharian sebagai peladang berpindah, hidup dengan suku yang relatif sama yaitu Suku Dayak Deah, dan sudah berinteraksi dengan masyarakat di luar komunitasnya.

Suku Dayak Deah adalah salah satu sub Suku Dayak yang mendiami beberapa desa di Kecamatan Upan, Muara Uya dan Haruai di Kabupaten Tabalong. Suku Dayak Deah di Dusun Sialing Kecamatan Haruai berjumlah 50 KK, sekitar 45 KK tinggal di rumah yang seluruhnya berbentuk pondok tidak layak huni terpencar dalam hutan/kebun karet. Ketidaklayakan rumah warga Suku Dayak Deah ini terlihat dari ukuran yang luasnya hanya sekitar 3x4 meter, semua aktivitas baik memasak, makan, tidur maupun menyimpan padi, dilakukan pada ruangan tersebut. Bahan bangunan dari kayu dan sebagian dari kulit kayu, bahkan terdapat rumah yang sebagian berinding dan sebagian dibiarkan terbuka, tidak tersedia air bersih, serta belum tersedia tempat MCK.

Pemberdayaan KAT Dusun Sialing, Desa Nawin Kecamatan Haruai dilaksanakan pada tahun 2015- 2016, dengan dibangun 45 rumah bagi warga KAT. Tujuannya agar mereka tidak lagi hidup terpencar atau berpindah-pindah, dan hidup layak sebagaimana warga masyarakat

Tabel 1. Umur, Jenis Kelamin dan Jumlah Tanggungan KAT Sialing

No.	Umur (th)		Jenis Kelamin			Jumlah Tanggungan			
	Kelompok	f	%	L/P	f	%	f	%	
1	21 – 30	8	17,78	Laki	44	97,78	0 – 1	10	22,22
2	31 – 40	7	15,56	Perempuan	1	2,22	2 – 3	28	62,22
3	41 – 50	12	26,67				4 – 5	6	13,33
4	51 – 60	16	35,56				6	1	2,22
5	61 – 70	2	4,43						
Total		45	100		45	100		45	100

Sumber: Monografi Desa Nawin, 2015.

pada umumnya. Pembangunan permukiman warga KAT di Dusun Sialing sekaligus sebagai rencana pengembangan pariwisata di wilayah tersebut. Melalui program pemberdayaan diharapkan dapat membantu peningkatan kesejahteraan warga KAT.

Kondisi KAT yang Diberdayakan

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa KAT yang diberdayakan berada di wilayah Dusun Sialing yang secara geografis letaknya memang relatif jauh dari pusat Desa Nawin, sekitar 14 kilometer. Lokasi permukiman sebagai pusat pemberdayaan memiliki luas sekitar tiga hektar. Di sekitar lokasi pemberdayaan terdapat lahan lebak (*baruh* istilah setempat) yang dikembangkan menjadi lahan sawah pertanian kering ditanami padi dan jagung. Pola pemberdayaan KAT Suku Dayak Deah Sialing bersifat *in-situ*, yakni dilaksanakan di tempat daerah asal di sekitar Gunung Sialing dan Gunung Manjuyu. Pertimbangan penggunaan pola *in-situ* selain berdasarkan aspirasi warga Dayak Deah, juga karena lokasi tersebut memiliki daya dukung lingkungan yang nyaman dan sejuk. Potensi ini ke depan dapat dikembangkan menjadi salah satu objek wisata, baik wisata alam maupun wisata budaya.

Warga KAT yang diberdayakan di Dusun Sialing berjumlah 45 keluarga terdiri dari 153 jiwa. Tabel berikut mendeskripsikan kondisi

umur, jenis kelamin, dan jumlah tanggungan warga KAT yang diberdayakan.

Berdasar kelompok umur, kepala keluarga yang diberdayakan paling banyak berada pada rentang usia antara 51 hingga 60 tahun (35,56%) dan antara 41 sampai 50 tahun (26,67%). Kondisi ini menunjukkan, bahwa sebagian besar warga KAT di Sialing berusia antara 41 hingga 61 tahun, sebelumnya bertempat tinggal tidak menetap, dan belum memiliki rumah secara permanen. Melalui program pemberdayaan, mereka disediakan rumah tempat tinggal yang layak, sebagai tempat untuk beristirahat, hidup menetap bersama keluarga. Rumah berbahan dasar papan yang nyaman dan aman, ada pintu dan cendela untuk sirkulasi udara. Mereka juga dapat berinteraksi dengan tetangga yang rumahnya berdekatan. Memiliki halaman di sekitar rumah yang dapat ditanami sayuran yang sewaktu-waktu dipetik untuk dimasak. Sebagaimana diungkapkan salah satu warga:

“Saya senang dengan tempat tinggal yang sekarang, rumah berdekatan, dapat saling tegur sapa, pokoknya senang, terasa nyaman dan tenang”.

Terkait kelompok umur, terdapat tujuh kepala keluarga (15,56%) berusia antara 31 sampai 40 tahun, dan delapan kepala keluarga (17,78%) berusia antara 21 hingga 30 tahun yang menetap di lokasi permukiman KAT tersebut. KAT yang diberdayakan berjumlah 45 keluarga,

hampir semua kepala keluarga adalah laki-laki dan hanya satu yang perempuan. Keseluruhan Suku Dayak Deah yang diberdayakan berjumlah 153 jiwa, terdiri 78 laki-laki dan 75 perempuan, dengan rerata jumlah tanggungan antara dua sampai tiga orang. Enam keluarga memiliki tanggungan empat sampai lima orang, 10 keluarga lain tidak memiliki tanggungan dan ada yang hanya memiliki satu orang tanggungan. Dapat dikatakan rata-rata setiap keluarga tinggal bersama keluarga batih dengan beberapa anak dan masih menjadi tanggungan orang tua. Ada 16 anak warga KAT berusia sekolah enam sampai 12 tahun dan 14 anak berusia satu hingga lima tahun yang potensial untuk mengikuti pendidikan sekolah dasar.

Kondisi KAT Sialing Sebelum dan Sesudah Diberdayakan

Mengacu Perpres No 186 Tahun 2014 pasal 17 pemberdayaan sosial terhadap KAT dilaksanakan dalam bidang permukiman, administrasi kependudukan, kehidupan beragama, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, penyediaan akses kesempatan kerja, penyediaan akses lahan, advokasi dan batuan hukum, pelayanan sosial, lingkungan hidup dan bidang lain sesuai kebutuhan KAT. Pemberdayaan KAT di lokasi penelitian diarahkan pada penyediaan pemukiman, kelengkapan administrasi kependudukan, akses pelayanan kesehatan dan pendidikan, mata pencaharian, ketersediaan sarana prasarana lain, serta kondisi interaksi warga. Kondisi KAT sebelum dan sesudah diberdayakan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kondisi Rumah

Kondisi rumah warga KAT dilihat dari rumah yang sudah dibangun setelah pemberdayaan dan dilihat juga dari kondisi rumah asli yang dahulu ditempati sebelum pemberdayaan. Rumah tersebut

masih dijumpai tidak jauh dari lokasi pemberdayaan. Berdasar hasil pengamatan dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 2. Kondisi Rumah Warga KAT Sialing Sebelum dan Sesudah Diberdayakan

No.	Aspek	Sebelum	Sesudah
1	Bentuk	Gubug sederhana, tidak permanen	Rumah panggung, permanen
2	Bahan	Kulit kayu, rumbia	Kayu, papan, seng
3	Pembagian ruang	Tidak ada, ukuran 3x4 m ² , semua jadi satu	Ada ruang tamu, kamar tidur, ruang keluarga & dapur, ukuran 5x6 m

Sumber: hasil pengumpulan data, 2018

Berdasar hasil wawancara dengan warga binaan, sebelum dimukimkan mereka bertempat tinggal di dalam hutan dekat dengan lahan atau ladang yang mereka garap. Mereka umumnya membuat gubug sederhana untuk bertempat tinggal, berbentuk panggung dengan memanfaatkan dahan pohon yang ada di hutan, dinding terbuat dari kulit kayu sehingga rumah tidak semuanya tertutup rapat. Gubug hunian tersebut tidak permanen dan tidak bertahan lama, biasanya ditinggalkan begitu saja ketika mereka membuka lahan baru untuk berladang di tempat lain. Gubug berukuran sekitar empat kali lima meter, belum ada pembagian ruang sehingga semua aktivitas baik memasak, makan, tidur, maupun menyimpan padi dilakukan di ruangan tersebut. Keberadaan tempat tinggal seperti itu sudah lama dihuni secara turun temurun.

Program pemberdayaan KAT diawali dengan memukimkan warga dan menyediakan tempat tinggal yang lebih layak. Bentuk bangunan berupa rumah panggung disesuaikan dengan model rumah adat Suku Dayak. Rumah panggung sudah ditempati

secara turun temurun, karena model rumah panggung ketika ditempati terasa lebih hangat dan aman dari binatang buas. Kerangka rumah bantuan berbahan kayu, dinding dan lantai terbuat dari papan, dan beratapkan seng. Ukuran rumah lima kali enam meter didalamnya dilengkapi ruang tamu, dua kamar tidur, ruang keluarga menyatu dengan dapur dan teras kecil. Pengamatan di lapangan terlihat, bahwa rumah yang dibangun meskipun kecil tetapi terlihat kokoh, sirkulasi udara ruangan cukup bagus, rumah-rumah terlihat berjajar dan tertata rapi. Di samping dan belakang setiap rumah masih tersisa lahan yang digunakan untuk menanam sayur dan buah-buahan. Hasil panen dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan ongkos untuk membeli sayuran.

Tujuan program pemberdayaan agar warga KAT terpenuhi kebutuhan dasar baik pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan maupun pelayanan sosial. Mayoritas warga KAT yang diberdayakan di Sialing yakni 43 keluarga (96%) menyatakan puas atas rumah bantuan yang diterima. Mereka bersyukur dan berterima kasih karena telah disediakan lahan dan dibuatkan rumah tempat tinggal yang layak oleh pemerintah. Hal tersebut dibenarkan oleh R (sekitar 70 tahun) seorang kepala Suku Dayak Deah menyatakan:

“Atas nama warga Sialing berterima kasih pada pemerintah pusat dan daerah yang sudah menyediakan lahan dan rumah layak bagi mereka. Kami merasa senang dan betah tinggal di tempat yang baru. Sebelum di sini kami tinggal di dalam hutan berpencar-pencar”.

Melalui program pemberdayaan, mereka dimukimkan dalam satu tempat,

disediakan lahan dan dibuatkan rumah sehingga memiliki tempat tinggal layak untuk menetap. Lokasi permukiman merupakan daerah asal muasal leluhur mereka yaitu di sekitar Gunung Sialing dan Gunung Manjuyu yang memiliki ikatan emosional dengan warga Suku Dayak Deah. Keberadaan rumah membuat mereka nyaman dan betah tinggal secara menetap, meskipun mereka dalam waktu tertentu harus pergi meninggalkan rumah untuk berladang di hutan dan menunggu hasil panen agar terhindar dari penjarahan. Rumah yang diberikan tentunya menjadi impian dan harapan mereka agar bisa hidup secara layak dan sehat. Rumah panggung bantuan juga disesuaikan dengan bentuk rumah asli warga Suku Dayak Deah. Pembagian ruang dalam rumah juga membuat mereka nyaman dalam beraktivitas, baik untuk istirahat, menerima tamu maupun memasak. Apalagi dengan adanya bantuan peralatan rumah tangga yang bisa digunakan untuk keperluan beraktivitas keseharian. Demikian juga bantuan peralatan kerja seperti cangkul, cethok, dan parang dapat mereka gunakan untuk berkebun sayuran di belakang rumah yang lahannya memang sudah disediakan.

2. Bidang Kependudukan

Di bidang kependudukan baik sebelum maupun sesudah dimukimkan diketahui, belum semua warga KAT Sialing terdaftar secara administrasi. Baik sebelum maupun sesudah diberdayakan masih dijumpai warga yang belum memiliki kartu identitas diri seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan akte kelahiran. Kenyataan ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah desa setempat dengan melakukan pendataan ulang pada warga KAT Sialing agar dapat segera tercatat secara administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Tabalong. Pendataan ulang dimaksudkan agar warga KAT Sialing segera dapat tercatat sebagai warga negara Indonesia sehingga memiliki identitas diri secara jelas dan memperoleh hak-haknya. Kepemilikan identitas diri penting bagi seluruh warga negara Indonesia agar mereka dapat memperoleh program pemerintah seperti mendapatkan kartu Indonesia sehat (KIS), kartu Indonesia pintar (KIP), kartu keluarga sejahtera (KKS), program keluarga harapan (PKH), dan beras sejahtera (Rastra).

3. Pelayanan Kesehatan

Berkait pelayanan kesehatan bagi warga Suku Dayak Deah sebelum diberdayakan dapat dikatakan masih memprihatinkan. Umumnya mereka belum terjangkau pelayanan kesehatan, pengobatan oleh dukun atau orang yang dituakan dengan memanfaatkan ramuan dan dedaunan berkhasiat yang disediakan alam. Mereka hidup di dalam hutan tanpa memperhatikan kebersihan lingkungan. Kondisi kebiasaan hidup sehat warga Suku Dayak Deah sebelum dan sesudah diberdayakan terdeskripsikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Pola Hidup Sehat Sebelum dan Sesudah Diberdayakan

No.	Aspek	Sebelum	Sesudah
1	Kebersihan diri	Kurang terawat	Terawat
2	Kebersihan lingkungan	Kumuh	Bersih, tertata, rapi
3	Cara berobat	Diobati sendiri	Medis
4	Tempat berobat	Tetua adat	Pusling

Sumber: hasil pengumpulan data, 2018

Pelayanan kesehatan sangat minim, menurut kesaksian salah satu warga, di masa lalu banyak dari anggota keluarga mereka ketika masih kecil meninggal dunia sebelum berumur lima tahun. Hal ini membuktikan bahwa daerah mereka begitu terisolir, sama

sekali tidak mendapatkan akses pelayanan kesehatan, apalagi mereka hidup di pondok yang berpencar dalam hutan.

Setelah dimukimkan, pelayanan kesehatan dilakukan dengan memfungsikan balai sosial untuk kegiatan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan diberikan baik pada balita, anak-anak, orang dewasa maupun untuk para lanjut usia. Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh tenaga medis dalam program Puskesmas Keliling (Pusling) Kecamatan Haruai. Saat penelitian dilakukan, terlihat warga sangat antusias memeriksakan kesehatan dan berkonsultasi dengan dokter ataupun perawat.

Keterlibatan Dinas Kesehatan dalam pemberdayaan KAT di Sialing adalah memberikan pelayanan kesehatan bagi warga melalui program Pusling. Kegiatan tersebut dilaksanakan paling tidak sebulan sekali, sekaligus mengadakan posyandu. Layanan kesehatan ini dilakukan oleh Puskesmas Kecamatan Haruai, berupa pemeriksaan rutin kepada semua warga baik yang sehat maupun sakit. Pada saat pemeriksaan kesehatan, juga dilakukan penyuluhan kepada warga tentang pola hidup sehat, serta upaya menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri.

Kegiatan posyandu bertujuan agar anak warga KAT terpantau berat dan tinggi badan, mendapat edukasi soal gizi, dan terlaksananya kegiatan pemberian makanan tambahan (PMT). Selain tujuan tersebut, para ibu mendapat penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat, serta peningkatan gizi anak. Tujuan tersebut sesuai dengan himbuan Menteri Sosial, bahwa dalam rangka mendukung program pemberdayaan KAT pemerintah daerah agar memberikan layanan di bidang kesehatan melalui

kegiatan Posyandu bagi balita dan lanjut usia.

4. Bidang Pendidikan

Pada awal sebelum diberdayakan terdapat sekitar 50 kepala keluarga warga Suku Dayak Deah yang tinggal di Sialing. Akibat berbagai kesulitan hidup, sebagian diantara mereka terutama kalangan muda terpaksa berpindah meninggalkan tempat asalnya, guna mencari pekerjaan seperti ke Kecamatan Upau, Muara Uya, bahkan ke Kalimantan Timur. Bagi anak usia sekolah yang ingin mengikuti pendidikan dasar ataupun sekolah lanjutan, terpaksa dititipkan kepada keluarga di luar Sialing seperti di Desa Hayup, Kembang Kuning, bahkan ada yang mengirim anak ke Tanjung (ibukota Kabupaten Tabalong) untuk dapat melanjutkan pendidikan. Kondisi pendidikan Suku Dayak Deah dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 4. Kondisi Pendidikan Sebelum dan Sesudah Diberdayakan

No.	Aspek	Sebelum	Sesudah
1	Wahana pendidikan	Keluarga	Keluarga, Formal
2	Fasilitas pendidikan	Belum ada	Gedung, ruang kelas PAUD
3	Pendamping pendidikan	Belum ada	Guru honor
4	Kemampuan baca tulis	Sebagian mampu	Mampu

Sumber: hasil pengumpulan data, 2018

Pendidikan menjadi masalah mendasar bagi anak-anak Suku Dayak Deah dari masa lalu hingga sekarang. Dahulu belum ada sekolah yang dekat, mereka harus berjalan sekitar dua atau tiga kilometer menuju sekolah di desa tetangga. Saat musim kemarau panas terik, kalau musim hujan jalanan berlumpur sampai lutut. Sekarang sudah dibangun sekolah dasar di Pasar Batu,

tetapi tetap saja sulit dijangkau anak-anak Suku Dayak Deah karena jaraknya relatif. Menurut penuturan beberapa keluarga, mereka terpaksa menitipkan anak di rumah keluarga yang bermukim di sejumlah desa yang memiliki sekolah dasar atau mengirim ke Tanjung (ibukota Kabupaten Tabalong) kalau ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, seperti SMK. Ketiadaan fasilitas pendidikan dan kondisi permukiman yang jauh menyebabkan anak-anak Suku Dayak Deah tidak memperoleh pelayanan pendidikan secara memadai.

Setelah diberdayakan, di lokasi pemberdayaan KAT Dusun Sialing sudah dibangun gedung untuk menampung anak untuk bermain dan belajar bersama, khususnya bagi anak usia balita. Gedung tersebut dibangun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong terutama untuk mendukung kegiatan PAUD. Saat dilakukan penelitian, dijumpai beberapa anak usia antara satu hingga lima tahun sedang belajar menggambar, menulis dan ada yang belajar membaca didampingi oleh dua guru pengasuh. Peralatan yang tersedia di ruangan tersebut cukup lengkap seperti meja kursi untuk belajar, alas untuk duduk dan bermain, alat permainan edukatif, serta sejumlah buku bacaan. Sarana prasarana ini merupakan bantuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong. Menurut penuturan pendamping, guna mendukung proses belajar mengajar, mereka masih membutuhkan buku modul untuk pembelajaran, yang akan digunakan sebagai acuan atau pedoman bagi para pengasuh atau guru dalam mendampingi anak.

5. Mata Pencaharian

Mata pencaharian warga KAT di Sialing sebelum dan sesudah diberdayakan tidak mengalami banyak perubahan mayoritas

bekerja sebagai petani yakni 92 persen. Pekerjaan sebagai petani sudah mereka tekuni secara turun temurun, bahkan tanaman karet yang mereka olah merupakan warisan dari orangtua. Tanaman karet yang mereka olah rata-rata sudah berumur 25 sampai 30 tahun. Karet menjadi andalan hidup warga KAT, hasil dari karet berupa *lateks* mereka jual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Beberapa tahun lalu harga *lateks* cukup bagus sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup warga, tetapi saat ini harga *lateks* jatuh. Informasi dari Kepala Desa Nawin, pohon karet yang mereka tanam adalah karet lokal yang kualitasnya kurang bagus. Melalui program pemberdayaan, warga KAT mengharapkan ada keterlibatan dari instansi terkait untuk memberikan penyuluhan tentang cara menanam, merawat, dan memanen sekaligus memberikan bantuan bibit tanaman karet yang berkualitas.

Selain mengolah karet, mereka juga menanam padi di ladang yang biasanya dilakukan sekali dalam setahun, padi yang sudah kering disimpan untuk persediaan kebutuhan keluarga sampai panen berikutnya. Lahan yang tersisa di lokasi pemberdayaan pada umumnya ditanami sayuran seperti terong, kacang panjang, singkong, daun katu, dan cabai yang asal bibit dari pembagian saat awal program pemberdayaan. Hasil pengamatan di lapangan terlihat, bahwa tanaman tersebut tumbuh subur dan hasilnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kendala yang dihadapi warga, hasil panen yang melimpah ini belum dapat dijual ke pasar, terkadang dibuang menjadi sampah atau dibiarkan busuk. Jarak yang jauh dengan pusat desa mengakibatkan mereka belum menjual hasil sayuran yang

melimpah, dengan alasan keuntungan yang diperoleh tidak sebanding dengan ongkos yang dikeluarkan. Berdasar pengalaman tersebut, mereka berharap bisa mendapatkan penyuluhan terkait keterampilan tentang cara mengolah berbagai hasil tanaman agar laku dijual. Terlihat di lahan warga banyak dijumpai tanaman cabai yang buahnya melimpah. Oleh karena itu, mereka perlu bimbingan atau pelatihan cara mengolah cabai tersebut agar dapat dijual dalam kondisi kering atau jika mungkin dalam bentuk sambal. Menyikapi kondisi ini, warga tentu membutuhkan keterampilan tersebut dan diharapkan ada peran dari instansi terkait yang memiliki kompetensi di bidang ini seperti dinas pertanian.

Di lokasi pemberdayaan Dusun Sialing ada tiga kolam atau tambak yang belum dimanfaatkan secara optimal. Artinya, keberadaan kolam tersebut belum dimanfaatkan warga untuk budidaya ikan dan sejenisnya. Kolam tersebut jika dimanfaatkan untuk memelihara ikan, maka hasilnya selain untuk dikonsumsi warga juga dapat dijual sebagai tambahan penghasilan. Dibutuhkan campur tangan dari berbagai pihak dan instansi terkait dalam mengembangkan potensi dan sumber alam yang dimiliki Dusun Sialing sehingga dapat bermanfaat meningkatkan kesejahteraan warga KAT.

6. Sarana dan Prasarana

Kondisi pelayanan dasar terutama prasarana transportasi, diakui bahwa sebelum diberdayakan Sialing merupakan lokasi permukiman Suku Dayak Deah yang nyaris tidak pernah tersentuh program pembangunan. Satu-satunya program pembangunan di Sialing yang terasa dampaknya sampai saat ini adalah

pembuatan jalan/prasarana transportasi melalui program Tentara Masuk Desa (TMD) sekitar tahun 1987. Jalan tersebut meskipun kurang terurus tetapi sekarang menjadi jalan setapak yang dapat dilalui sepeda motor. Keberadaan jalan tersebut sangat besar dampaknya bagi Suku Dayak Deah karena mampu mendorong beberapa keluarga pindah bermukim di pinggir jalan yang berdekatan dengan Gunung Sialing dan Gunung Manjuyu. Jalan ini merupakan satu-satunya akses bagi warga Suku Dayak Deah untuk keluar wilayah, baik berkegiatan sosial maupun ekonomi, khususnya dalam mengangkut dan menjual karet, ataupun berbelanja berbagai kebutuhan di Pasar Batu.

Berkait dengan sarana dan prasarana yang dimiliki warga KAT sebelum dan sesudah diberdayakan, dideskripsikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. Sarana dan Prasarana Warga KAT Sialing Sebelum dan Sesudah Diberdayakan

No.	Aspek	Sebelum	Sesudah
1	MCK	Tidak ada	Ada 4 unit
2	Prasarana transportasi	Jalan setapak	Jalan lebar 8 m
3	Penerangan	Tidak ada	Dalam proses
4	Tempat belajar	Tidak ada	Ada
5	Tempat berobat	Tidak ada	Ada
6	Tempat beribadah	Tidak ada	Ada
7	Balai sosial	Tidak ada	Ada

Sumber: hasil pengumpulan data, 2018

Suku Dayak Deah ketika masih tinggal di dalam hutan, memanfaatkan aliran sungai atau air hujan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Mereka belum memiliki sarana MCK, mereka mandi di sungai atau di sekitar rumah dengan menampung air hujan, sedangkan buang air besar di dalam hutan. Kebiasaan ini membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sehat. Penyediaan

rumah bagi warga KAT Suku Dayak Deah sudah dilengkapi sarana MCK meskipun jumlahnya masih sangat terbatas, yakni hanya dua unit. Warga mengeluhkan kondisi ini, keberadaan MCK saat ini belum sebanding dengan jumlah warga yang bermukim. Hasil wawancara dengan berbagai instansi terkait dan diperkuat hasil diskusi terfokus, beberapa instansi dan dunia usaha berkomitmen menyediakan dan membangun fasilitas MCK, serta menyediakan kebutuhan air bersih bagi warga seperti Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Kesehatan dan Yayasan Adaro Bangun Negeri (YABN).

Menurut Kepala Desa setempat, sekitar empat tahun lalu akses menuju Dusun Sialing berupa jalan setapak yang hanya dapat dilewati dengan sepeda motor. Kondisi jalan masih terjal berupa bebatuan, jika musim hujan keadaannya becek dan licin. Jalan suasananya sepi, dengan kanan kiri ditanami pohon karet yang ditumbuhi semak belukar, hanya warga Sialing yang berani lewat di daerah tersebut. Setelah dilakukan pemberdayaan, akses jalan menuju Dusun Sialing mulai dibersihkan, diperlebar, dan yang berlubang ditutup dan dilapisi aspal. Ruas jalan dibuat batas yang jelas sehingga lebar jalan lebih terlihat. Dari pusat Desa Nawin, meskipun harus melewati desa lain, kendaraan roda empat bisa langsung menuju ke Dusun Sialing. Dalam upaya untuk lebih memperpendek jarak tempuh dari Dusun Sialing ke pusat Desa Nawin, saat pengumpulan data penelitian ini sedang dilakukan pembukaan jalan tembus untuk akses warga ke Desa Nawin. Apabila jalan baru ini dibuat tentu menghemat jarak tempuh ke pusat Desa Nawin. Upaya ini bertujuan, selain untuk memperlancar

transportasi warga Sialing menuju pusat Desa Nawin, juga untuk mendorong agar kegiatan perekonomian warga Suku Dayak Deah semakin maju, dengan menjual hasil bumi ataupun pertanian ke pusat desa.

Berkait kebutuhan penerangan baik sebelum maupun sesudah diberdayakan masih menjadi kendala bagi warga KAT Suku Dayak Deah. Selama ini mereka sama sekali belum tersentuh fasilitas penerangan, untuk penerangan mereka menggunakan obor dan lampu minyak. Setelah diberdayakan sudah ada wacana dan komitmen dari pemerintah daerah untuk menyediakan listrik dari tenaga surya, namun hingga saat ini juga belum terealisasi. Diakhir kegiatan penelitian, di sepanjang jalan menuju Dusun Sialing sudah terlihat beberapa tiang listrik yang siap ditanam. Keberadaan tiang ini membuktikan bahwa pemerintah daerah betul-betul mendukung program pemberdayaan KAT.

Akses jalan merupakan fasilitas penting yang dibutuhkan warga KAT di Sialing. Awalnya kawasan Sialing sebagai lokasi permukiman warga KAT merupakan daerah terpencil, susah dijangkau, karena melewati jalan setapak yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki atau naik kendaraan sepeda motor. Melalui program pemberdayaan KAT, akses jalan menuju Dusun Sialing sudah diperlebar, diratakan dan dilapisi aspal sehingga saat ini untuk menuju lokasi KAT sudah lebih mudah, karena jalan cukup lebar dan bisa dilalui kendaraan roda empat. Berkait akses transportasi tersebut, sebanyak 91 persen atau 41 keluarga menyatakan sudah memadai, jalan cukup lebar, dan kondisinya rata, sehingga nyaman untuk dilalui. Keterlibatan pemerintah daerah terkait penyediaan infrastruktur jalan,

melalui instansi berkompeten sudah merencanakan pembuatan jalan tembus menuju pusat Desa Nawin, sebagai upaya mempendek jarak tempuh. Kondisi ini tentu sangat menguntungkan bagi warga KAT di Sialing, karena dengan tersedianya akses jalan daerah mereka mudah dijangkau dan terhubung dengan wilayah desa sekitar. Ketersediaan akses jalan dan terhubungnya wilayah tersebut juga merupakan harapan warga, agar banyak program pemerintah yang masuk di Sialing.

Berkait ketersediaan fasilitas penerangan pada lokasi permukiman KAT di Sialing hampir semua warga binaan menyatakan tidak memadai. Di lokasi pemberdayaan KAT belum tersedia fasilitas penerangan listrik, untuk memenuhi kebutuhan penerangan warga menggunakan lampu minyak. Dalam wawancara lebih lanjut terungkap, bahwa warga KAT berharap agar pemerintah daerah terus berupaya menyediakan fasilitas penerangan. Harapan tersebut tampaknya akan segera terwujud, karena instansi terkait sudah menyiapkan tiang listrik yang siap ditanam di sepanjang jalan. Hal ini terwujud karena upaya Kepala Desa Nawin yang dengan gigih melakukan pendekatan pada sejumlah instansi terkait untuk memenuhi kebutuhan penerangan bagi warga KAT di Sialing.

Berkait permukiman warga KAT menurut penuturan beberapa warga, kondisinya jauh berbeda dengan tempat tinggal mereka yang lama. Mereka mengaku senang dan betah tinggal di rumah baru yang dirasa lebih layak. Selain itu, mereka bisa tinggal dalam satu lingkungan yang berdekatan dengan sanak saudara yang lain, sehingga interaksi dan komunikasi menjadi semakin mudah dan akrab.

7. Interaksi Warga

Suku Dayak Deah yang diberdayakan berasal dari lima keturunan leluhur yang sama, diantara keluarga memiliki hubungan darah. Interaksi sosial antarwarga cukup dekat, karena diantara mereka ada yang melakukan perkawinan sesama saudara dalam satu suku. Kondisi ini membuat hubungan dan interaksi antar mereka semakin kuat. Selain pernikahan sesama suku, beberapa orang Suku Dayak Deah juga ada yang menikah dengan orang dari luar suku, misalnya dengan Suku Jawa, Batak, dan Bali. Mereka meskipun menikah dengan suku lain atau orang di luar komunitasnya, tetapi memiliki kedekatan relasi hidup secara berdampingan dan rukun, serta memiliki sikap gotong royong yang sangat kuat.

Disebutkan bahwa Suku Dayak Deah Sialing berasal dari nenek moyang yang sama, berasal dari lima keturunan yang sama sehingga diantara mereka memiliki hubungan kekerabatan yang sangat kuat dan dekat. Hubungan kekerabatan yang dekat membuat hampir semua warga KAT menyatakan mampu berinteraksi sosial di antara warga KAT. Mereka rerata mampu berinteraksi, bekerja sama, dan hidup rukun berdampingan satu sama lain. Demikian juga dalam interaksi dengan warga sekitar, warga KAT menyatakan mampu berinteraksi sosial secara baik. Kemampuan berinteraksi sosial tersebut tentu memberi manfaat dan kemajuan bagi warga KAT di Sialing. Sialang ke depan direncanakan menjadi lokasi desa wisata. Selain “menjual” wisata alam berupa bukit dan gua, juga menampilkan kekayaan budaya dan kearifan lokal Suku Dayak Deah.

8. Harapan Warga KAT

Suku Dayak Deah Sialing memiliki harapan terhadap keberlanjutan program pemberdayaan. Dalam wawancara dan diskusi dengan warga KAT di balai sosial setempat, diperoleh informasi sejumlah kebutuhan yang masih mereka harapkan. Sebagaimana disampaikan perwakilan tokoh masyarakat setempat R yang menyatakan:

“Kami butuh tambahan tempat MCK, karena saat ini hanya ada dua sehingga kami harus bergiliran. Terkadang kami harus lari ke hutan untuk buang air besar karena WC masih digunakan orang lain”.

Warga KAT lain secara langsung mengungkapkan harapannya:

“Kami pingin mendapat bimbingan dan penyuluhan pertanian agar dapat memanfaatkan lahan yang ada. Juga penyuluhan untuk budidaya perikanan karena tidak jauh dari rumah kami ada kolam yang belum dimanfaatkan”.

Harapan tersebut disampaikan karena Wilayah Sialing dikaruniai tanah subur, sehingga berbagai tanaman yang ditanam di lingkungan pemukiman KAT dapat tumbuh subur, terutama sayuran. Melalui penyuluhan mereka mendapat pengetahuan cara mengolah dan memanfaatkan lahan yang tersedia.

Warga KAT juga berharap dibuatkan sertifikat kepemilikan lahan yang ditempati, agar ada kejelasan status kepemilikan lahan tersebut, sehingga mereka tidak merasa khawatir akan digusur atau dipindahkan ke lokasi lain. Selain itu, warga KAT berharap dapat memiliki kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Hasil wawancara dengan warga KAT ini didukung pernyataan Kepala Desa Nawin:

“Administrasi kependudukan di Sialing memang belum terdata secara baik, sehingga masih dijumpai ada warga yang belum memiliki kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan akte kelahiran”.

Sebagaimana tujuan dalam program pemberdayaan yakni mewujudkan kemandirian maka pemerintah menyediakan berbagai kebutuhan dasar warga KAT sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya, secara perlahan setelah diberdayakan, diharapkan warga KAT semakin berdaya, dapat berfungsi sosial dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Hal itu sejalan dengan berbagai pendapat para ahli yang menjelaskan tentang manfaat dan tujuan pemberdayaan sebagaimana yang telah diuraikan di muka (Suharto, 2005; Sumodiningrat, 2000).

KESIMPULAN

Berdasar uraian tersebut, dapat disimpulkan, bahwa terdapat perubahan secara positif kondisi KAT sebelum dan sesudah pemberdayaan. Keberdayaan perubahan secara positif kondisi KAT tersebut dapat dilihat pada berbagai aspek berikut.

1. Semua warga KAT yang dimukimkan telah menempati rumah bantuan pemerintah. Warga Suku Dayak Deah di Sialing, sebelum diberdayakan tinggal di gubug sangat sederhana dalam hutan, setelah diberdayakan menempati rumah bantuan permanen berbentuk panggung dan ditempatkan dalam satu lingkungan di dekat tanah leluhur mereka.
2. Warga Suku Dayak Deah di permukiman Sialing, sebelum diberdayakan sebagian besar belum memiliki kartu identitas diri, setelah dimukimkan masih ada warga yang belum memiliki kartu identitas baik kartu keluarga maupun KTP. Kondisi ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah desa

setempat, sehingga dilakukan pendataan agar mereka segera memiliki kartu identitas diri.

3. Sebelum diberdayakan warga Dayak Deah di Sialing tinggal dalam gubug sederhana di hutan, mereka belum memperhatikan aspek kesehatan, seperti buang air besar sembarangan sehingga mengganggu kesehatan lingkungan. Apabila sakit diobati sendiri karena letak Puskesmas relatif jauh. Setelah dimukimkan tempat tinggal mereka dan lingkungan sekitar tampak bersih, apalagi halaman sekitar rumah ditanami bunga, sayuran, dan buah-buahan sehingga menambah lingkungan menjadi asri. Pelayanan kesehatan diberikan oleh Pusling yang melakukan pemeriksaan kesehatan bagi warga.
4. Warga Dayak Deah di Sialing sebelum dimukimkan apabila menyekolahkan anak harus menitipkan pada keluarga lain yang tinggal di desa yang dekat sekolah. Anak balita tidak memperoleh kesempatan mendapatkan pendidikan prasekolah. Setelah diberdayakan, telah dibangun ruang kelas untuk belajar bagi anak usia balita melalui kegiatan PAUD. Bangunan disediakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong yang diharapkan menjadi embrio sebagai rintisan sekolah.
5. Warga Dayak Deah dipermukiman Sialing masih mengandalkan hidup dari bertani karet dengan hasil dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Matapencaharian lain adalah bertani padi yang hasilnya dikonsumsi sendiri.
6. Sebelum diberdayakan, warga Dayak Deah di Sialing hidup terpencil di dalam hutan, akses jalan sulit dilalui. Prasarana MCK belum tersedia, penerangan, tempat belajar, tempat berobat, dan tempat ibadah juga belum ada. Setelah dimukimkan, akses jalan menuju Sialing sudah tersedia, MCK tersedia meskipun jumlahnya terbatas. Sudah dibangun balai sosial yang

dimanfaatkan warga untuk berkumpul, beribadat, kegiatan pemeriksaan kesehatan dan kegiatan lain. Penerangan belum tersedia di lokasi permukiman warga Dayak Deah di Sialing.

7. Sebelum dimukimkan, warga KAT di Sialing hidup terpencar dalam hutan, interaksi sosial dilakukan hanya dengan kelompoknya. Setelah diberdayakan, warga Suku Dayak Deah Sialing dimukimkan dalam satu lokasi yang dulu merupakan tanah leluhur mereka. Mereka berasal dari lima keturunan yang sama yakni Suku Dayak Deah sehingga umumnya mampu berinteraksi sosial dengan baik. Mereka juga mampu berinteraksi dengan masyarakat sekitar sehingga kehidupan sosial warga di permukiman baru tetap terjalin secara harmonis. Warga KAT masih mempertahankan adat budaya dan tradisi leluhur.
8. Warga KAT di Sialing berharap agar Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong menambah fasilitas MCK dan penerangan. Warga juga berharap diberi penyuluhan dan bimbingan terkait budidaya pertanian dan perikanan sehingga mampu mendayagunakan potensi alam setempat menjadi lebih bermanfaat. Harapan selanjutnya adalah pembuatan sertifikasi lahan, kartu identitas diri bagi yang belum memiliki.

SARAN

Sesuai kesimpulan tersebut, diajukan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh pengambil kebijakan.

1. Pemberdayaan KAT perlu keterlibatan dan peran pemerintah daerah dengan menyinergikan program berbagai instansi berkompeten membidangi permukiman, administrasi kependudukan, kehidupan beragama, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, penyediaan akses kesempatan kerja, penyediaan lahan, advokasi dan bantuan

hukum, pelayanan sosial, serta lingkungan hidup.

2. Terkait harapan warga, perlu mengoptimalkan peran pemerintah daerah, terutama keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyediakan akses pemenuhan kebutuhan dasar warga KAT. Utamanya sarana yang mendukung keberdayaan KAT meliputi sarana pengembangan perekonomian warga seperti pasar, sarana pendidikan, kesehatan, pos sosial, dan peribadatan. Agar mereka betah dan kerasan tinggal di lokasi permukiman baru.
3. Agar peran dan keterlibatan pemerintah daerah dalam pemberdayaan KAT semakin kuat perlu legalitas dan perlu dirumuskan pembagian kewenangan sesuai bidang tugas dan komposisi pembiayaan baik antara pemerintah pusat dan daerah maupun antarinstansi terkait di daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian ini. Terimakasih juga disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, yang mendukung kegiatan penelitian ini. Kepada informan, utamanya warga KAT Sialing, pendamping, kepala desa, instansi terkait, dan semua pihak yang terlibat dalam penelitian hingga penyusunan tulisan ini disampaikan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakar, A. & Ghofur, Abd. (2017). Problematika Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Sakai Di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. *Media Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 9, No. 1.

- Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. (2016). *Petunjuk Teknis Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil melalui Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan*. Kementerian Sosial.
- Ife, J. & Tesoriero, F. (2008). *Community Development: Alternatif Pembangunan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jayaputra, A. & Shamadiyah, N. (2016). *Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kampung Pantan Sinaku Kabupaten Bener Meriah*. Jakarta: UJM Press.
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. (2005). *Qualitative Data Analysis*. Jakarta: UI Press.
- Moleong. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prijono, O.S. & Pranarka, A.M.W. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*.
- Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial KAT*.
- Suharto, E. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Permasalahan dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Rafika Aditama.
- Sujarwani, R., Wulandari, F.D., Husni, A., Rianto, F., & Sarinah. (2018). *Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) oleh Pemerintah Kabupaten Lingga. Kepulauan Riau. Faculty Of Social And Political Sciences. Universitas Andalas, Vol. 20*.
- Sulistiyani, A.T. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.
- Sumodiningrat, G., (2000, Mei). *Visi dan Misi Pembangunan dengan Basis Pemberdayaan Masyarakat*. Seminar Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Menyongsong Indonesia Baru, Yogyakarta.
- Suradi, Mujiyadi, Unayah, N., Sitepu, H. & Suyanto. (2013). *Kebijakan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil*. P3KS.
- Tim BPS. (2016). *Kabupaten Tabalong dalam Angka*. Badan Pusat Statistik.
- Wignyo, A., (2009). *Menggugat Perencanaan Partispatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Putra Media Nusantara.